

IFB
338.43
LOK
l

2017.89
OK

LOKAKARYA
PENELITIAN AGROINDUSTRI

10 - 12 Agustus 1989

| | |
|-------------|------------|
| KOLEKSI PIP | |
| TANGGAL | 9 Sept. 89 |
| NO. SERI | 2619 |
| NO. KLAS. | |
| KETERANGAN | |



IPB20010409

PSP - PPLH - ISS
1989

Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 16.00 - 17.00 | e. PIR - BUN - (Hasil Pengamatan Sementara dan Rencana Penyelesaian Penelitian): Proses Peralihan dari Perkebunan Karet ke PIR-Kelapa di Cikaso, Sukabumi Selatan | Mies Grijs | C. Wiradi | Heru | |
| JUMAT, 11-08-1989 08.30 - 08.45 | f. PIR - Buah - (Bencana Penelitian) : PIR-Kelapa di Ciamis Selatan | Hetifah | | J. Tamrin | Leti S. |
| 08.45 - 09.15 | (Bencana Penelitian): Pembentukan PIR Nasional untuk ekspor di Subang | M. Taabunan ✓ Ekawati Sri Wahyuni | | | |
| * Sidang III: <u>STUDI-STUDI INDUSTRI PEMOLAHAN HASIL PERTANIAN NON-PIR (AGRO-PROCESSING INDUSTRIES)</u> | | | | | |
| 09.15 - 09.45 | a. Tapioka (Hasil Penelitian) Industri Aci Skala Besar dan Sedang di 8 Kabupaten Jabar Tinjauan Umum | Roma Manurung | M. Taabunan | | |
| 09.45 - 10.00 | (Hasil Penelitian) Industri Aci Skala Kecil di Cipamuan Bogor | Roma Manurung ✓ | | | |
| 10.00 - 10.30 | - (Bencana Penelitian) Industri Aci di Jawa Barat | J. Hardjono Maspiyati | | | |
| 10.30 - 11.00 | b. Karet - (Bencana Penelitian) Industri Pengolahan Karet | Ar. Soekarjo | | | Arya H.D |
| 11.00 - 11.45 | c. Komoditi-komoditi lain - Diskusi Umum : Identifikasi Industri-Industri Agro-Processing lainnya yang Perlu Diteliti (Berdasarkan 1) data-data sekunder; 2) usulan-usulan peserta. | Ekawati Sri Wahyuni | | | |
| 11.45 - 14.00 | I S T I R A H A T - Makan siang. | | | | |

DAFTAR ISI

1. Jadwal Acara Lokakarya
2. Agro-Industri Di Jawa Barat : Konsep Permasalahan, Dan Kerangka Analitis, oleh : Benyamin White - ISS
3. Agro-Industri Di Jawa Barat (Analisis Data Sekunder) oleh : Mangara Tambunan dan Ekawati Sri Wahyuni Pusat Studi Pembangunan - IPB.
4. Ringkasan Studi Persusuan Dan Peternakan Sapi Perah Skala Kecil Di Jawa Barat, oleh : Juni Thamrin.
5. Organisasi Produksi Dan Ketenagakerjaan Pada Industri Perunggasan Di Jawa Barat, oleh : J. Jardjono dan Maspiyati.
6. Studi Kemungkinan Pembentukan PIR Nanas untuk Ekspor Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, oleh : Tim PSP - IPB.
7. Kegiatan Industri ACI Di Desa Cipambuan, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, oleh : Roma Chrysta Manurung dan Yusuf Sozawato Laze - Draft Kedua.
8. Rencana Penelitian, Peranan Industri Pengolahan Karet Dalam Meningkatkan Peluang Berusaha Di Daerah Pedesaan (Agustus 1989- Juni 1990), oleh A. Soeharjo.
9. Kuesioner Untuk Usaha Kecil.



PSP-IPB o ISS o RPLH-ITB

PROYEK PENELITIAN SEKTOR NON-PERTANIAN PEDESAAN JAWA BARAT

LOKAKARYA PENELITIAN AGRO-INDUSTRI

PSP-IPB Bogor, tgl. 11 - 13 Agustus 1989

AGRO-INDUSTRI DI JAWA BARAT: KONSEP,
PERMASALAHAN, DAN KERANGKA ANALITIS

Benjamin White

ISS

Agustus 1989

AGRO-INDUSTRI DI JAWA BARAT: PERMASALAHAN,
KERANGKA ANALITIS DAN AGENDA PENELITIAN

I. PENGANTAR

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan suatu latar belakang dan kerangka analitis umum untuk kelompok penelitian "Agro-industri" dalam proyek Penelitian Sektor Nonpertanian Pedesaan Jawa Barat. Latar belakang dan kerangka analitis tersebut perlu mencakup beberapa aspek atau masalah sbb:

- (a) mengapa bidang agro-industri mempunyai kedudukan yang penting dalam proyek penelitian tentang sektor non-pertanian di Jawa Barat;
- (b) pengertian tentang cakupan konsep "agro-industri"
- (c) pengertian tentang masalah-masalah analitis bersifat umum yang berkaitan dengan berbagai jenis agro-industri
- (d) pengertian yang lebih tajam tentang masalah-masalah kebijakan dan masalah-masalah penelitian yang perlu diutamakan dalam studi-studi kasus.

Masalah-masalah diatas sebagiannya telah ditulis dan dibahas dua kali sebelumnya, pada Lokakarya Proyek I di Bandung pada bulan September 1987 (White 1987) dan pada Lokakarya Proyek II pada bulan Agustus 1988 (White et al. 1988: Bab II-III; lihat juga Hasil Diskusi Kelompok Agro-industri, 14.8.88). Masalah-masalah yang sama juga dibahas pada pertemuan peneliti agro-industri di PSP-IPB Bogor pada tgl. 5 Juli yl. Sebagian besar dari tulisan ini (Bab II-III, Bab V-VI) merupakan saduran dan perbaikan dari kedua tulisan sebelumnya, dengan beberapa tambahan literatur.

Mengingat waktu yang terbatas, maka sebagian dari rencana tulisan ini (Bab IV, Bab VII) terpaksa disajikan secara lisan, untuk dikembangkan pada kesempatan lain.

II. PENTINGNYA AGRO-INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Mulai sejak anjlognya penerimaan dari sektor migas, pengolahan hasil pertanian untuk ekspor makin mencolok sebagai suatu prioritas tinggi dalam usaha pembangunan tingkat nasional. Pemerintah sedang aktif mendorong pengembangan berbagai macam komoditi pertanian, baik yang lama maupun yang baru, baik untuk ekspor, maupun untuk pasaran kota domestik.

Dalam bidang produksi serta pengolahan komoditi-komoditi pertanian untuk ekspor, Propinsi Jawa Barat mempunyai sejarah yang panjang dan rumit. Proporsi luas tanah pertanian yang dikuasai dalam bentuk perkebunan-perkebunan (negara maupun swasta) di Jawa Barat adalah relatif tinggi dibanding propinsi-propinsi Jawa lainnya. Diantara tanah-tanah perkebunan tsb, terdapat pula cukup banyak yang terkategori "perkebunan terlantar" (seperti banyak dilaporkan dalam pers nasional maupun pers daerah pada tahun 1988) yang dianggap kurang memenuhi peranan ekonomi dan sosialnya dalam hal produktivitas, usaha ekspor ataupun penyerapan tenaga kerja; dengan demikian, usaha untuk mencari masa depan yang sesuai untuk tanah-tanah perkebunan tsb merupakan suatu bidang permasalahan yang cukup penting.

Diluar masalah perkebunan tsb, lokasi propinsi Jawa Barat (yang dekat pada dua aglomerasi urban yang besar yaitu Jakarta/Jabotabek dan Bandung, dan juga dekat pada saluran-saluran ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan Jakarta) menjadikan propinsi tersebut suatu lokasi yang banyak diincar untuk investasi dalam berbagai macam produksi pertanian, peternakan dan perikanan komersial yang bernilai tinggi (sayur-mayur; buah-buahan; bunga; unggas dan telur; ikan, udang dsb.) untuk ekspor dan/atau pasaran urban.

Jika kita melihat jumlah penduduk yang terlibat dalam bidang "agro-industri" (dalam arti luasnya, seperti akan diuraikan dibawah), maka agro-industri merupakan sumber kesempatan kerja yang besar, bahkan mungkin yang terbesar diantara seluruh sektor "nonfarm" di pedesaan Jawa Barat.

III: AGROINDUSTRI: KONSEP DAN PENGERTIANNYA

Dalam pengertian "agro-industri" terdapat berbagai definisi alternatif yang tidak semuanya akan dibahas disini. Untuk keperluan kita dalam proyek ini, diusulkan kita berpegang pada pengertian agro-industri dalam arti luasnya, yang meliputi:

(a) dua jenis industri pengolahan yang berkaitan langsung dengan produksi pertanian primer:

(i) industri "hulu"/industri pengolahan input pertanian (pupuk, pestisida, pakan ternak/unggas/ikan, peralatan pertanian dsb.). Industri-industri tsb tidak selalu berlokasi dipedesaan.

Di Indonesia, industri agro-input tsb pada umumnya cenderung relatif padat-modal dan skala besar (kecuali beberapa subsektor dari cabang industri peralatan pertanian: pacul, golok dsb).

(ii) industri "hilir"/pengolahan hasil pertanian (aci, minyak kelapa, pengalengan buah, dsb). Dalam hal ini, batas antara "industri pengolahan hasil pertanian" (agro-processing industries) dan "industri makanan" (food industries) sering tidak jelas. Pada umumnya, batasan "agro-processing" yang praktis adalah mencakup tahapan pengolahan pertama saja, misalnya:

- industri pengolahan padi menjadi beras, tetapi bukan berbagai macam industri makanan berdasarkan beras
- pengeringan dan pengolahan tembakau tetapi bukan industri rokok
- pengolahan pucuk teh menjadi teh hitam atau teh hijau, tetapi bukan produksi "teh botol"/"teh kotak", atau produksi kemasannya (botolnya, labelnya, dsb.)

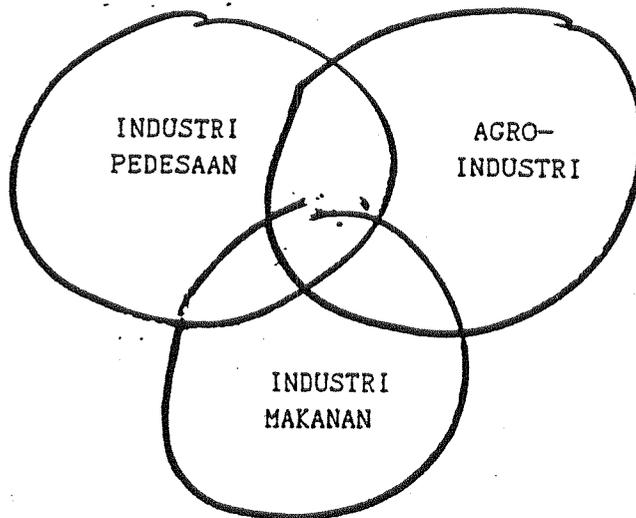
[nb. industri pakan ternak/unggas/udang mempunyai status khusus, sebagai industri "hulu dan sekaligus hilir" dalam hubungannya dengan pertanian: bahan bakunya adalah hasil pertanian, produknya adalah input pertanian juga]

(b) "industrial agriculture", yaitu bentuk-bentuk organisasi produksi primer yang mengarah ke organisasi industri. Kategori ini tidak termasuk dalam pengertian industri pedesaan (tetapi akan hampir selalu berkaitan dengan industri

pengolahan). "Industrial agriculture" ini mempunyai dua tipe pokok, yang masing-masing punya analognya dalam sektor industri manufaktur:

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bentuk organisasi "industrial agriculture" (produksi primer): | Analog dalam industri Manufaktur: |
| Perkebunan besar (plantation) | Pabrik besar |
| Contract farming dengan model "inti-rakyat" | Sistim sub-kontrak (komersial atau industrial) |

Dengan pengertian "agro-industri" seperti diatas, maka jelas bahwa "agro-industri" tidaklah sama dengan "industri pedesaan" ataupun "industri makanan", meskipun akan mempunyai banyak overlap dengan kedua sektor tersebut:



Barangkali masih perlu dijelaskan, mengapa kategori "industrial agriculture" tsb dimasukkan dalam pengertian agro-industri dalam proyek ini, apakah tidak tergolong kegiatan produksi primer ("farm") sedangkan fokus proyek kita adalah sektor "non-farm"? Penjelasan yang singkat dapat kita berikan sbb:

- (a) salah satu tema penting dalam proyek kita adalah tema "farm/nonfarm sector interactions" (interaksi antara sektor pertanian dan non-pertanian), sedangkan
- (b) "industrial agriculture" (dalam bentuk perkebunan besar

maupun contract farming) justru merupakan suatu cara untuk mengatur "farm/nonfarm sector interactions" tersebut, yaitu hubungan antara sektor primer dengan sektor agribusiness (produksi dan penyediaan input, maupun pengolahan dan pemasaran output pertanian)

IV. AGROINDUSTRI: PERMASALAHAN (UMOM)

[Bab ini belum sempat ditulis, dan akan disampaikan secara lisan]

V: PERKEBUNAN BESAR (PLANTATIONS): KANTONG KEMISKINAN ATAU PENGGERAK PEMBANCUNAN PEDESAAN YANG DINAMIS ?

Apa itu "plantation" (perkebunan besar), dan ciri-ciri apakah yang membedakannya dengan bentuk-bentuk produksi pertanian lainnya? Lembaga plantation telah didefinisi dengan berbagai cara. Salah satu definisi yang lazim dipakai adalah sbb:

"Plantation adalah unit ekonomi yang menghasilkan komoditi-komoditi pertanian (tanaman tahunan atau tanaman keras, tetapi bukan ternak) untuk dijual, dan mempekerjakan sejumlah besar buruh yang relatif tak terampil, yang kegiatannya diawasi dengan ketat. Plantation umumnya mempunyai angkatan kerja sepanjang tahun yang cukup besar jumlahnya, dan umumnya mengkhususkan diri dalam menghasilkan hanya satu atau dua macam produk. Plantation dapat dibedakan dari jenis-jenis usahatani lainnya dalam hal pola peng-kombinasian faktor-faktor produksi, terutama manajemen dan tenaga kerja" [Jones, 1968, sebagaimana disitir oleh Kirk, 1987b: x-xi]

Kita dapat bandingkan definisi "the modern plantation estate" (perkebunan besar modern) yang lebih tajam dan lebih terbatas, oleh Graham dan Floering:

"[Modern plantation adalah] Suatu organisasi untuk produksi tanaman komoditi secara skala-besar, dengan sistim penanaman, pemeliharaan dan sering juga pengolahan ditempat yang: seragam, dibawah manajemen sentral dan mengandalkan angkatan kerja yang terlatih. Angkatan kerja tsb adakalanya bermukim di permukiman perkebunan, dalam suatu lingkungan yang juga dikelola oleh manajemen yang sama. Dasar dari plantation adalah sifat pengendalian dan pelatihan angkatan kerjanya secara ahli, dengan menggunakan teknik kerja dan supervisi rutin yang teliti" (Graham & Floering, 1984: 15).

Dengan demikian, perbedaan antara perkebunan besar dan unit-unit produksi pertanian lainnya bukan hanya dalam hal perbedaaan skala, tetapi juga dalam hal cara mereka membaurkan tiga ciri lainnya yaitu:

- (i) orientasi organisasi dan pemasaran yang bersifat metropolitan,
- (ii) sifat unit usaha yang vertically integrated (produksi dan pengolahan dilakukan pada unit yang sama)
- (iii) hubungan tenaga kerja dan manajemen yang khas, dan
- (iv) "totalitas" mereka sebagai lembaga ekonomi maupun sosial.

Dengan demikian perkebunan besar itu, sebagai unit produksi dan pengolahan komoditi pertanian yang berskala besar, mengandalkan tenaga buruh dan ber-manajemen "berat", merupakan semacam analog agraris dari pabrik besar dalam sektor industri manufaktur.

Selama beberapa dasawarsa yang lalu telah terjadi suatu debat mengenai ciri serta implikasi dari lembaga plantation ini, yaitu antara (a) pandangan plantation sebagai unsur "developmental/progressive" versus (b) pandangan plantation sebagai penyebab "kemiskinan kronis" (persistent poverty). Pada suatu pihak terdapat pemikiran "persistent poverty" yang dikembangkan oleh cendekiawan-cendekiawan kepulauan Karib (Beckford, 1972). Pandangan ini melihat plantation sebagai suatu penyebab utama dari keterbelakangan yang berlangsung terus, terutama karena sifatnya yang self-contained, semacam enclave dan "lembaga total".

Menurut pandangan "persistent poverty" (Beckford dll.), plantation dalam bentuk klasiknya pada umumnya ditandai oleh

- (a) tingkat upah yang sangat rendah dibanding apa yang berlaku pada sektor-sektor lain,
- (b) adanya sistim produksi, pengolahan dan pengemasan yang hanya sedikit memerlukan masukan dari unsur-unsur luar (jadi: kurang memiliki linkages dengan ekonomi sekitarnya), dan
- (c) karena bentuk pemilikannya, menunjukkan "leakage" (pembocoran) keuntungannya keluar dari perekonomian lokal (bahkan dalam kasus pemilikan asing, keluar dari perekonomian nasional), sehingga baik perkebunan yang modern dan serba efisien pun tetap tidak akan mendukung pengembangan dari wilayah dimana plantation itu berada.

Karena semua alasan tersebut, banyak penulis yang memandang plantation sebagai contoh klasik dari bentuk organisasi produksi yang "anti-pembangunan", karena hampir tidak mempunyai kaitan (linkages) dinamis yang berarti dengan perekonomian sekitarnya (cf. Saith, 1989).

Namun ada penulis lain yang melihat plantation sebagai lembaga agraris yang mempunyai peranan yang dinamis dan mendukung pembangunan, bahkan mereka menyarankan penyerapan prinsip-prinsip manajemen perkebunan terhadap banyak tanaman lain diluar apa yang sekarang diusahakan secara plantation, termasuk pula tanaman pangan (Graham & Floering, 1984).

Perdebatan ini kiranya cukup relevan dalam pemikiran tentang berbagai alternatif penggunaan (dan bentuk organisasi produksi) untuk tanah seluas i.k. 300.000 ha yang dikuasai dalam bentuk

"Perkebunan Besar" di Jawa Barat. Jika lembaga perkebunan besar itu memang merupakan "kantong-kantong kemiskinan", yang lebih ditandai "pembocoran" daripada "kaitan" dalam hubungannya dengan ekonomi sekitarnya, maka timbul pertanyaan: apakah bentuk organisasi produksi ini merupakan pilihan penggunaan tanah yang tepat, dalam suatu lingkungan padat penduduk dimana dasar kebijakan penguasaan serta penggunaan tanah harus berpaling pada masalah peranan sosial-ekonominya tanah didalam masyarakat.

VI. CONTRACT FARMING DAN MODEL-MODEL PERTANIAN "INTI-SATELIT"

Contract farming

Sebenarnya, bentuk Perkebunan Besar/plantation konvensional tidak akan berekspansi di Jawa Barat, malah telah terlihat suatu kecenderungan dimana Perkebunan-perkebunan Besar diganti secara perlahan-lahan atau parsial oleh bentuk-bentuk produksi agro-industri yang lain yang mengandalkan "petani kecil" (smallholders). Kecenderungan ini terlihat pula di berbagai negara lainnya.

Karena berbagai alasan, perusahaan agroindustri besar (domestik maupun internasional, baik milik negara maupun swasta) diberbagai negara makin mengundurkan diri dari keterlibatan langsung dalam produksi primer, dan makin banyak "memborongkan" (mengkontrakkan) produksi primer kepada kaum petani "kecil". "Contract farming" nampaknya menjadi alternatif yang menarik bagi perusahaan-perusahaan tsb. Apa yang dimaksudkan dengan "contract farming"?

"Contract farming adalah suatu cara mengatur produksi pertanian dimana petani-petani kecil atau "outgrowers" diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian (contract). Badan sentral yang membeli hasil tersebut dapat menyediakan nasehat teknis, kredit serta masukan-masukan lainnya, dan juga menangani pengolahan dan pemasaran. Sistem ini juga telah dijuluki "core-satellite model" (model inti-satelit), dimana "inti" membeli hasil primer dari petani-petani "satelit" yang telah dikontrak. Dalam suatu versi khusus yang dikembangkan oleh Commonwealth Development Corporation [CDC - sebuah badan yang aktif juga di Indonesia, -BW], "inti" tsb dibentuk

sebagai "nucleus estate", yaitu mencakup sebuah perkebunan kecil yang dikelola sendiri dan sebuah unit pengolahan dimana sejumlah petani disekitarnya telah menjanjikan akan menyediakan hasil mereka" (Kirk, 1987: 46-47)

Dengan demikian "contract farming" dalam arti ini mencakup berbagai bentuk "PIR" yang ditemukan di Jawa Barat, dan juga berbagai macam perjanjian antara petani kecil dengan penampung/pengolah swasta yang barangkali tidak tergolong sistem "PIR" resmi; misalnya, rencana dimana petani-petani kecil akan menghasilkan "timun Jepang" untuk sebuah perusahaan patungan di Jakarta untuk diekspor ke Jepang.

Berbagai penulis telah mencatat suatu aspek dari sistem "contract farming" yang menarik dan berimplikasi bagi kerangka analitis kita, yaitu bahwa contract farming itu "mempunyai kemiripan yang mencolok dengan usaha industri rumahtangga diluar sektor pertanian yang melakukan sub-kontrak " seperti terdapat misalnya dalam industri konfeksi (Wilson, 1986: 47). Kita dapat membedakan tiga jenis contract farming, menurut sampai sejauh mana "inti" melibatkan dirinya dalam keputusan-keputusan produksi ditingkat petani-petani "satelit"nya:

- (a) marketing contracts (kontrak pemasaran) "menentukan jenis dan/atau jumlah produk pertanian yang akan diserahkan, tetapi jarang menyebut kegiatan-kegiatan atau metode-metode khusus mana yang harus diikuti dalam proses produksi, juga tidak mengharuskan pihak inti (pengolah) untuk menyediakan masukan-masukan tertentu seperti bibit, pakan atau peralatan". (Dengan demikian, kontrak seperti ini hanya merupakan semacam "perjanjian untuk membeli kelak");
- (b) Production contracts (kontrak produksi): yaitu "perjanjian antara petani dan perusahaan bukan-tani yang menentukan jenis serta jumlah produk pertanian yang akan dihasilkan, dan juga dapat menetapkan varietas bibit, kegiatan-kegiatan dalam proses produksi, serta masukan-masukan atau bantuan teknis mana yang harus disediakan oleh si pemberi kontrak"; dan
- (c) vertical integration (integrasi vertikal), dimana "semua tahapan produksi dirangkul dalam satu perusahaan, sedangkan pasar tidak berperan dalam pengkoordinasian berbagai tahapan produksi. Dalam kasus ini, perusahaan bukan-tani itu memiliki baik bahan-bahan baku, sarana-sarana produksi maupun hasil produksi. Si "petani" menjadi ekwivalen dengan seorang manajer atau pengawas sewaan, ataupun hanya seorang pekerja borongan" (Wilson, 1986: 50-51)

[catatan: sistim "PIR" dapat dilihat sebagai usaha untuk menghindari "vertical integration" tsb]

Contract farming: beberapa implikasi

Barangkali ciri yang paling penting dalam semua hubungan contract farming adalah bahwa hubungan tersebut "merupakan perjanjian antara petani dengan pemasok input atau penampung/pengolah yang menggantikan peranan pertukaran di pasar bebas" (Wilson, 1986: 49). Dalam aspek inilah -- dimana produsen-produsen kecil dilindungi atau di-isolasi dari pasar bebas -- mungkin kita dapat melihat keuntungan potensial, tetapi juga ancaman potensial, bagi kaum petani "satelit". Hal ini dapat lebih dimengerti jika kita melihat, faktor-faktor apakah yang akan menyebabkan sebuah perusahaan "inti" (milik negara ataupun swasta) menjadi tertarik untuk menghindari keterlibatan langsung dalam kegiatan produksi primer.

Pada zaman pasca-kolonial di Dunia Ketiga, jika perusahaan-perusahaan agrobisnis besar ingin melibatkan diri secara langsung dalam pertanian skala-besar a la "plantation", mungkin mereka akan dihadapi oleh berbagai macam kesulitan. Misalnya, penguasaan tanah besar-besaran bisa menjadi sebuah liabilitas politik (lihat misalnya nasib perkebunan-perkebunan milik Belanda pada tahun 1957-58 di Indonesia!); atau dalam kasus perusahaan-perusahaan yang baru ingin menerobos dunia pertanian pada wilayah padat-penduduk seperti Jawa Barat, akses pada areal tanah besar mungkin akan sangat sulit dan sangat mahal. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan beralih ke strategi "inti-satelit", yang justru

"berhasil memisahkan masalah investasi dalam pengolahan serta pemasaran dari masalah penguasaan tanah yang peka"

(Williams & Karen, 1985: 8)

Mungkin juga mereka akan mengalami kesulitan dalam hal menghadapi sebuah angkatan kerja buruh yang besar jumlahnya (ini terutama dalam negara-negara dimana lembaga-lembaga perserikatan buruh menjadi kuat). Dalam perjanjian contract farming -- beda dengan Perkebunan Besar atau pertanian kapitalis -- si petani

"menjanjikan akan menjual hasilnya, bukan tenaga kerjanya. Dengan demikian, perusahaan pemberi kontrak yang hanya sedikit menggunakan tenaga kerja dapat mengurangi biaya-biaya untuk manajemen tenaga kerja dan dapat menghindari adanya perselisihan-perselisihan perburuhan yang merugikan" (Kirk,

Dengan demikian, dilihat dari segi kepentingan perusahaan agrobisnis tadi, strategi organisasi produksi "inti-satelit" menyediakan peluang untuk menghindari aspek-aspek negatif dari kedudukannya sebagai usaha raksasa (yang mungkin juga asing) didalam suasana politik yang nasionalis (mencurigai modal asing), populis (mencurigai usaha raksasa), demokratis (melindungi kepentingan buruh serta menghargai hak mereka untuk berorganisasi), dsb.

Akan tetapi, strategi "inti-satelit" itu bukan hanya masalah menghindari aspek-aspek negatif; dapat juga dilihat sebagai strategi yang mempunyai beberapa aspek positif yang penting (dari segi kepentingan modal besar/agrobisnis). Misalnya, dengan merelakan kegiatan produksi primer tetap dalam tangan kaum petani kecil, mereka dapat menghindari banyak risiko serta ketidakpastian yang terkandung dalam produksi pertanian atau dalam fluktuasi permintaan dan penawaran, dengan cara mengalihkan risiko-risiko tsb kepada kaum petani (bandingkan argumen-argumen klasik yang mirip untuk menerangkan adanya fenomena sub-kontrak dalam industri manufaktur).

Selain alasan tersebut (yang mungkin tidak banyak berlaku untuk Indonesia masa kini), kita dapat menambahkan alasan lain: dengan cara membeli "produk dari petani" dan bukan "tenaga kerja dari buruh tani", perusahaan pemberi kontrak itu mengalihkan semua urusan pengerahan dan pengendalian tenaga kerja ke pihak rumahtangga tani; dengan cara ini juga, pihak pemberi kontrak secara tidak langsung akan ber-akses pada tenaga kerja rumahtangga yang tidak dibayar, termasuk tenaga kerja perempuan dan anak, melalui mekanisme "self-exploitation" ("pemerasan terhadap diri sendiri") yang merupakan ciri khas dari rumahtangga tani (sebagaimana diuraikan oleh Chayanov dan banyak penulis lainnya). Singkat kata, ini akan berarti bahwa rumahtangga tani "satelit" akan "membayar" imbalan pada dirinya (anggotanya) yang lebih rendah dibanding upah buruh yang berlaku di pasar tenaga kerja bebas.

(Dalam konteks ini, implikasi dari agro-industri berbentuk "PIR" bagi keterlibatan wanita, remaja dan anak dalam kegiatan produksi adalah topik penting untuk penelitian kita)

Namun demikian, dapat juga ditanyakan, apakah perusahaan agro-bisnis yang mengandalkan strategi "inti-satelit" tidak akan kehilangan penguasaannya atas proses produksi, yang akan berarti tidak lagi dapat mengendalikan masalah produktivitas, mutu serta standarisasi hasil, ketepatan waktu panen dsb ? Dengan menghindari keterlibatan langsung dalam kegiatan produksi primer bukanlah berarti bahwa perusahaan "inti" tidak lagi sempat

mengendalikan proses produksi tsb.

"Pihak pemberi kontrak masih dapat mengandalkan penguasaan yang tidak sedikit atas kegiatan para petani outgrowers. Ini tercapai antara lain dengan cara menguasai saluran-saluran penyediaan kredit, pupuk serta masukan-masukan lainnya, juga dengan menguasai secara ketat kegiatan pengolahan sekunder maupun pemasaran, khususnya dimana ini merupakan monopoli. Umumnya, walaupun dasar penetapan grading mutu serta harga produk terkandung dalam kontrak, namun dalam prakteknya penerimaan serta grading dari hasil tani masih menurut kebijakan pihak pembeli. Juga, bagi kaum produsen kecil bukanlah hal yang muda untuk mengorganisir diri untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat yang ditawarkan oleh "inti" dan untuk memperjuangkan — misalnya — harga yang lebih baik. Dalam keadaan mereka yang geografis terpencar dan diliputi konflik-konflik kepentingan ditingkat lokal, maka terkenallah ketidakmampuan petani-petani kecil dalam hal mengadakan aksi kolektif secara kontinu" (Kirk, 1987: 47).

Dalam keadaan seperti ini, tidak mengherankan jika perusahaan-perusahaan agribisnis makin memilih untuk mengkhususkan diri pada kegiatan "hulu-hilir" (penyediaan inputs, pengolahan serta pemasaran outputs), "dimana terletak kebanyakan nilai tambah" (Goldsmith, 1985: 1127).

Untuk para petani "satelit", tentu saja mengadakan kontrak-kontrak dengan pihak "inti" secara potensial dapat memberikan beberapa keuntungan. Dalam batas tertentu mereka dapat meramalkan penghasilan mereka dengan tepat (sejauh pihak "inti" mengindahkan jaminan-jaminan harga, sesuai dengan kontrak), dan hal ini dapat memungkinkan mereka untuk mengambil risiko inovasi teknis. Juga melalui kaitan dengan "inti" mereka dapat menangkap beberapa ekonomi-skala secara tak-langsung, dalam hal akses terhadap input-input material maupun pelayanan, investasi modal yang "indivisible", pengolahan bermutu dsb. yang tidak mungkin akan tercapai oleh usaha-usaha mereka masing-masing yang berskala kecil; selain itu, tentu mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas untuk produk mereka (Goldsmith, 19895: 1127).

Isolasi pihak "satelit" dan masalah pembagian nilai tambah

Barangkali akan mulai nampak bahwa masalah (potensial) utama bagi petani "satelit" yang berkaitan dengan "isolasi" mereka dari pasar bebas adalah dalam hal pembagian "nilai tambah" antara pihak "satelit" dan pihak "inti", atau dalam kata lain antara usaha "farm" berskala kecil dan usaha "non-farm" berskala besar. (Hal ini juga menjadi masalah dalam semua bentuk sub-kontrak dalam industri manufaktur). Dalam pembelian input maupun

penjualan output, mereka menghadapi keadaan yang merupakan (atau mendekati) monopoli atau monopsoni. Dalam keadaan ini, masalah harga pada masing-masing tahap dalam rantai proses produksi-pengolahan-pemasaran akan lebih ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan daripada faktor-faktor pasar; dengan demikian penentuan harga bukan lagi menjadi masalah nilai-tambah "nyata" atau hasil interaksi supply-demand, tetapi lebih mencerminkan daya tawar sosial-politis (daripada daya tawar "pasar") dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Seperti halnya dengan struktur-struktur sub-kontrak dalam industri manufaktur, dimana sering dilaporkan bahwa struktur tsb memungkinkan pihak "inti" (pemberi kontrak) untuk berakumulasi atas dasar nilai tambah yang diciptakan oleh produsen-produsen kecil, tetapi tidak sempat mereka tangkap karena adanya manipulasi harga.

Didalam pola umum hubungan "inti-satelit" terdapat beberapa bentuk kelembagaan alternatif. Dalam sistim "PIR" misalnya, perusahaan "inti" atau "nucleus" dapat merupakan:

- (a) perusahaan swasta (nasional, asing atau patungan)
- (b) BUMN, atau
- (c) Koperasi yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh para petani kecil yang menjadi anggotanya

Masing-masing alternatif diatas dapat saja berpotensi untuk mendorong pertumbuhan produksi, namun bisa mengandung implikasi yang berbeda demi kedudukan serta penghasilan petani-petani kecil.

Dimana "inti" dimiliki oleh modal swasta, bentuk "inti-satelit" mungkin saja tidak merupakan "pertanian kapitalis" secara murni, tetapi tentu saja merupakan "suatu bentuk khusus dari penerobosan kapitalis kedalam pertanian (capitalist penetration of agriculture)" (Wilson, 1986: 47); sangat belum tentu kalau kepentingan "modal" dan kepentingan dari petani-petani satelit akan menjadi "kepentingan bersama". Besarnya keuntungan pada tingkat "inti" akan ditentukan -- selain oleh kendala-kendala biasa dalam hal efisiensi dsb. -- juga oleh kemampuan dari "inti" tsb untuk mengendalikan harga yang dibayar pada produsen dan (dalam kasus dimana inti juga menyediakan inputs) untuk meninggikan harga yang diterima dari mereka, dan untuk semakin menggeser keseimbangan "nilai tambah" kearah inti.

Jika perusahaan BUMNlah yang menjadi "inti", maka kadang-kadang BUMN tsb memang mempunyai tujuan dan misi sosial selain tujuan mencari keuntungan belaka. Namun demikian, BUMN juga diharapkan oleh negara akan meraih keuntungan (apalagi dalam konteks keluhan-keluhan "inefisiensi BUMN" di Indonesia akhir-akhir ini),

sehingga keadaan dan kepentingan mereka mungkin tidak akan jauh berbeda dengan perusahaan kapitalis diatas.

Inti yang berbentuk koperasi (menurut teorinya) merupakan bentuk kelembagaan dimana para "satelit" dapat mengatasi problem-problim diatas, sebagai anggota dan pemilik-bersama dari "inti"nya sendiri. Menurut teorinya, dalam bentuk koperasi sebenarnya cara pembagian "nilai tambah" diantara "inti" dan "satelit" tidak begitu penting, karena keuntungan di "inti" toh dimiliki juga oleh para anggota, dan akan dikembalikan kepada mereka secara langsung atau tak-langsung. Dengan cara ini, si "petani" ikut menikmati keuntungan dari tahapan "farm" dan "nonfarm" sekaligus, dalam suatu usaha agro-industri. Akan tetapi, dalam kasus koperasi suka terdapat jurang cukup lebar antara teori dan kenyataan, sehingga kadang-kadang suasana politik dan catur-kuasa lokal memungkinkan sebuah koperasi (atau pengurusnya) untuk menjadi semacam predator terhadap anggotanya, terutama dalam hal manipulasi harga dan manipulasi keuntungan.

Demikian kiranya dapat dikonstatir bahwa walaupun model "inti-satelit" sendiri sebagai prinsip adalah "netral" (yaitu: tidak memihak), namun bentuk organisasi spesifik yang diterapkan, serta keadaan serta suasana lingkungan sosial-politik dimana prinsip tsb dihayati dan dilaksanakan tidak akan bersifat netral. Hal ini serta implikasi-implikasi konkritnya kiranya perlu menjadi suatu fokus utama dari penelitian kita.

Masalah hubungan satelit "kedalam" dan "kebawah"

Sampai disini, kita baru menyinggung beberapa masalah yang dapat timbul dalam hubungan antara "inti" dan "satelit". Dalam kenyataannya, struktur hubungan produksi yang nyata dalam kebanyakan bentuk contract-farming adalah jauh lebih rumit, dan tidak hanya menyangkut dua pihak ini. Kita perlu juga menelaah berbagai jenis hubungan pada tingkat "dibawah" tingkat hubungan inti-satelit, misalnya:

- (a) hubungan antara pihak "petani satelit" dan pekerjanya. Dalam banyak kasus, unit "satelit" dalam formasi "PIR" sebenarnya bukan merupakan "usahatani keluarga" yang murni, tetapi "usaha berskala kecil atau sedang" yang mengandalkan (sebagian atau 100%) tenaga kerja buruh. Dengan adanya diferensiasi antar usahatani, adanya usahatani yang mengandalkan buruh dapat dilihat misalnya dalam PIR-Unggas, PIR-Teh, Petani sapi perah, petani tambak intensif, dan juga dalam tebu rakyat TRIS.

- (b) Dalam kasus dimana "satelit" memang merupakan unit produksi berdasarkan tenaga kerja rumahtangga, bentuk serta dinamika hubungan kerja didalam rumahtangga juga perlu diteliti. Khususnya pembagian kerja intern, pengambilan keputusan dan kekuasaan atas penghasilan usahatani berdasarkan hierarki umur dan/atau gender. Kedudukan perempuan dalam sistim PIR misalnya sampai sekarang kurang mendapat perhatian, sebagaimana halnya dengan kedudukan remaja dan anak.

VII. INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (NON-PIR)

[Bab ini belum sempat ditulis dan akan disampaikan secara lisan]

Daftar Pustaka

[Catatan: semua referensi dibawah ada di perpustakaan ISS Bandung. Kebanyakan juga telah difotokopi untuk PSP-IPB dan PPLH-ITB]

- Beckford, G. (1972). Persistent Poverty: Underdevelopment in Plantation Economies in the Third World. Oxford, University Press.
- Goldsmith, A. (1985). The Private Sector and Rural Development: Can Agribusiness Help the Small Farmer? World Development 13 no 10/11: 1125-1138.
- Graham, E. with I. Floering (1984). The Modern Plantation in the Third World. London, Croom Helm.
- Kinsey, B. H. (1987). Agribusiness and Rural Enterprise. London, Croom Helm. ✓
- Kirk, C. (1987). Contracting Out: Plantations, Smallholders and Transnational Enterprises. IDS Bulletin 18 no 1: 45-51.
- Kirk, C. (1987b). People in Plantations: a Review of the Literature and Annotated Bibliography. Brighton, Institute of Development Studies.
- Saith, A. (1989). Location, Linkage and Leakage: Malaysian Rural Industrialization in National Perspective. The Hague, ISS Working Papers no 56.
- White, B. (1987). Agro-industry in West Java: New (and Old) Organisational Forms of Agro-Production and Processing for Export and Urban Markets. West Java Rural Nonfarm Sector Research Project, First Annual Workshop, Bandung, 18-21 August 1987.
- White, B., Mangara Tambunan, Juni Thamrin, Indrasari Tjandraningsih, Anastasia Jobs (1988). Agro-industries in West Java: I. Progress Report, II. Policy and Research Issues, III. Research Agenda
- Williams, S. & R. Karen (1985). Agribusiness and the Small-Scale Farmer: A Dynamic Partnership for Development. Boulder, Westview Press. ✓
- Wilson, J. (1986). The Political Economy of Contract Farming. Review of Radical Political Economics 18 no 4: 47-70.